

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Nopiyah Sari  
NIM : 22 2012 203**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2016**

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Nopiyah Sari  
NIM : 22 2012 203**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nopiyah Sari

NIM : 22 2012 203

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

2016

Peneliti,



Nopiyah Sari

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

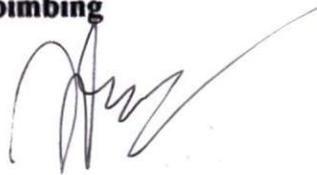
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul : Analisis optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian  
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota  
Palembang**

**Nama : Nopiyah Sari**  
**Nim : 22 2012 203**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal,**

**Pembimbing**



**(Ida Zuraidah, Hj., S.E., M.Si)**  
**NIDN: 0224017201**

**Mengetahui  
Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)**  
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

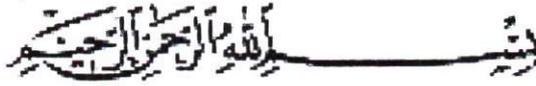
*Motto :*

- *"Kesuksesan adalah Hak Setiap orang yang berusaha "*
- *"Yang terpenting bukan berapa banyak yang kita hasilkan, tapi berapa banyak kita membantu ribuan orang agar bisa mengangkat haekat martabat keluarga."*
- *"Gagal adalah sebuah proses yang kita lalui sebelum kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan."*
- *"Bukan seorang pemuda yang membanggakan harta kedua orang tua, tapi pemuda itu adalah AKU, ANDA, KALIAN, MEREKA yang berjuang untuk keluarga tercinta."*

*Terucap syukur pada MU Allah SWT.*

*Kupersembahkan untuk:*

- *Ayah dan Almarhumah IbuKu  
Tercinta*
- *Keluarga Ku Tersayang*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku*



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.” untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar sarjana S1.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang, maka yang akan dianalisis dalam bab ini adalah mengenai optimalisasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang. Oleh karena itu terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada orang tuaku Almarhumah Ibuku tercinta Farina dan Ayahku tercinta Romli Muin atas Do'a kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberi motivasi yang tak henti-hentinya untuk menjadikan saya lebih baik. Terima kasih untuk selalu menjadi penyemangat dalam hidupku. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Zuraidah, Hj., S.E., Ak., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor dan beserta staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan MM selaku Dekan dan beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E AK, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluargaku tersayang Noni Roselina AM.Kep , Fajar Riansyah, Marzaen, Fitri Rama Rani S.E . Terima kasih telah memberikan dorongan semangat dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2016

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN/COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Retribusi .....	10
a. Pengertian retribusi daerah.....	10

b. Jenis-jenis retribusi daerah.....	10
c. Karakteristik pemungutan retribusi daerah.....	13
d. Ciri-ciri retribusi.....	13
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	14
a. Pengertian pengujian kendaraan bermotor.....	14
b. Objek dan subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor.....	14
c. Pemungutan retribusi.....	14
d. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif.....	15
e. Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.....	16
f. Tata cara pembayaran.....	16
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
a. Pengertian pendapatan asli daerah.....	17
b. Sumber pendapatan asli daerah.....	17
c. Pemetaan potensi pendapatan.....	18
d. Potensi keuntungan dan kerugian kemitraan pemerintahan daerah.....	18
e. Rencana penerimaan target retribusi.....	20
f. Penetapan target penerimaan retribusi.....	20
g. Penetapan target yang mempengaruhi penerimaan retribusi....	22
h. Strategi optimalisasi retribusi daerah.....	22
i. Efektivitas pendapatan asli daerah.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25

B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Operasionalisasi Variabel .....	26
D. Data yang Diperlukan .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	46
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah kendaraan yang diuji ker .....	4
Tabel II.1	Target dan realisasi retribusi pengujian bermotor .....	5
Tabel III.1	Penelitian sebelumnya.....	9
Tabel IV.1	Operasionalisasi Variabel .....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi.....	40
-------------	--------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Fotocopy* Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : *Fotocopy* Surat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 3 : *Fotocopy* Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : *Fotocopy* Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 5 : Biodata Peneliti

Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan

## ABSTRAK

Nopiyah Sari/222012203/Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang adalah memperluas basis penerimaan dengan mengevaluasi tarif penerimaan. Memperkuat proses pemungutan dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pengawasan, serta meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan dan menekan biaya pemungutan.

Kata Kunci ; optimalisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor

### **Abstract**

*Nopiyah Sari/222012203/ The Analysis of Motor Vehicle Testing Retribution Acceptance of the Communication Department, Palembang.*

*The formulation of the problem in this study was how to optimize the motor vehicle testing retribution acceptance of the Communication Department, Palembang. The objective of this study was to find out the way to optimize the motor vehicle testing retribution acceptance of the Communication Department, Palembang. This study was descriptive research. The data used in this study was secondary data. The techniques for collecting the data in this study were interview and documentation. The techniques for analyzing the data in this study were qualitative and quantitative analysis. The result of this study found that some efforts that needed to be done to optimize the motor vehicle testing retribution acceptance of the Communication Department Palembang were expanding the acceptancebase, strengthening the collecting process, improving the supervision and the revenue administration efficiency, and reducing the collecting cost. Expanding the acceptancebase could be done by evaluating the acceptance base; strengthening the collecting process could be done by raising human resourcesawareness; improving the supervision could be done by rechecking the service and giving the suitable appreciation for those who obeyed to pay the retribution.*

*Key Words ;optimization of vehicle testing*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan demi memajukan perekonomian suatu daerah. Sebagai daerah otonom, daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat.

Mahmudi (2009: 25) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Dinas Perhubungan kota Palembang.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era sekarang ini.

Undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah diharapkan dapat menghilangkan kecemburuan sosial yang selama ini paling sering muncul antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap daerah, untuk menjalankan dan memaksimalkan pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah tersebut dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan suatu daerah adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli daerah ( PAD ), (2) Dana Perimbangan., (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga faktor diatas, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan dalam suatu daerah.

Dinas pendapatan daerah dalam mengoptimalkan retribusi daerah dengan dibantu oleh dinas-dinas tertentu, salah satunya yaitu Dinas Perhubungan Kota Palembang yang setiap penerima pajak daerah dan retribusi daerah dari setiap dinas akan diserahkan kembali pada Dinas pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana dengan baik, pemerintah masih harus melakukan masih perluasan basis penerimaan, sehingga penerimaan retribusi pengujian kendaraan di kota Palembang belum memenuhi target seperti yang diharapkan, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Data Kendaraan yang di uji ker**  
**di Kota Palembang tahun 2011-2015**

Jenis kendaraan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Jumlah kendaraan	Jumlah yang ker								
Mobil penumpang	2.874	2.832	2.718	2.679	2.694	2.641	2.645	2.593	2.714	2.710
Mobil bus	1.898	1.870	1.562	1.540	1.443	1.415	1.178	1.132	1.174	1.169
Mobil bus t.umum	262	259	272	269	288	282	276	271	262	236
Mobil barang umum	3.736	3.683	5.018	4.945	6.685	6.554	5.525	5.417	12.800	12.688
Mobil brg t.umum	46.916	46.224	51.578	50.815	52.390	51.694	53.270	52.225	45.100	44.030
Mobil khusus TU	5.448	5.369	5.028	4.955	4.848	4.753	4.393	4.307	4.150	4.053
Kereta tempel	81	79	62	61	80	82	90	92	79	73
Kereta gandeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	61.215	60.316	66.236	65.264	68.428	67.421	67.377	66.037	66.279	64.959

Sumber : DISHUB Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa jumlah data kendaraan bermotor yang diujikermengalamipenurunandarijumlahkendaraan yang ada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah kendaraan sebesar 61.215 dan jumlah kendaraan yang ker sebesar 60.316, pada tahun 2012 jumlah kendaraan sebesar 66.236 dan jumlah kendaraan yang ker sebesar 65.264, pada tahun 2013 jumlah kendaraan sebesar 68.428 dan jumlah kendaraan yang ker sebesar 67.421, pada tahun 2014 jumlah kendaraan sebesar 67.377 dan jumlah kendaraan yg ker sebesar 66.037, pada tahun 2015 jumlah kendaraan sebesar 66.279 dan jumlah kendaraan yang ker sebesar 64.959 . Hal tersebut menjadikan peluang besar atau potensi yang baik bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang, tetapi pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak stabil. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2**  
**Data Target dan Realisasi Retribusi Pengujian**  
**Kendaraan Bermotor Kota Palembang**  
**2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	Rp.4.200.000.000	Rp.3.235.370.020	77,03%
2012	Rp.4.200.000.000	Rp.3.541.365.380	84,32%
2013	Rp.3.766.000.000	Rp.3.621.986.700	96,18%
2014	Rp.3.954.300.000	Rp.3.570.078.240	90,28%
2015	Rp.3.954.300.000	Rp.3.519.021.580	89,00%

Sumber : *DISHUB Kota Palembang, 2016.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum tercapai dilihat pada tahun 2011 persentasenya sebesar 77,03%, tahun 2012 persentasenya sebesar 84,32% dan pada 2013 terjadi peningkatan persentase sebesar 96,18% namun pada tahun

2014 terjadinya penurunan persentase sebesar 90,28% dan pada tahun 2015 sebesar 89,00%. Menurut bapak Niharmanzah kepala bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor hal tersebut disebabkan karena belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan, serta masih belum realistisnya didalam penetapan target PAD karena besarnya penentuan target belum disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi pengujian kendaraan bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai optimalisasi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusipengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang dan dapat menambah ilmu bagi penulis dalam melakukan penelitian.

##### 2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang

##### 3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sri (2013) yang judul optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Dinas perhubungan Kota Palembang, bagaimana optimalisasi pengawasan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang? rumusan masalah adalah bagaimana optimalisasi pengawasan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis optimalisasi pengawasan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif, lokasi penelitian yaitu dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Palembang, data yang diperlukan yaitu Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa Pemungutan Retribusi Terminal yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak beroperasi serta kesadaran wajib retribusi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mei, dkk (2013), yang judul Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pasar kabupaten sleman). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, bagaimana mengkaji dan menganalisis hambatan atau kendala apa yang

dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, bagaimana mengkaji dan menganalisis peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan dinas pasar kabupaten sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

**Tabel II.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang Sri (2013)	Sama-sama menggunakan metode deskriptif teknik analisis yang di gunakan sama-sama kualitatif, dan teknik pengumpulan data sama-sama melalui wawancara dan dokumentasi.	Perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu retribusi terminal pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2	Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pasar kabupaten sleman). Mei, dkk (2013).	Sama-sama menggunakan metode deskriptif teknik analisis yang di gunakan sama-sama kualitatif, dan teknik pengumpulan data sama-sama melalui wawancara dan dokumentasi	Perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu retribusi pasar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Sumber: *Peneliti, 2016*

## **B. Landasan Teori**

### **1. Retribusi Daerah**

#### **a) Pengertian Retribusi Daerah**

Ahmad (2009: 63) mendefinisikan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mahmudi (2010: 25) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi atau badan yang berkepentingan dalam penggunaan jasa atau izin tertentu tersebut

#### **b) Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Ida (2012: 89-112) menyebutkan Jenis-jenis retribusi dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

##### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sert dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pasal 109 jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Retribusi pelayanan kesehatan
- (b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- (c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil
- (d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- (e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- (f) Retribusi pelayan pasar
- (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (j) Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
- (k) Retribusi pengolahan limbah cair
- (l) Retribusi pelayanan tera ulang
- (m) Retribusi pelayanan pendidikan
- (n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

## 2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha sesuai pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- (a) Retribusi pemakayan kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokohan

- (c)Retribusi tempat pelelangan
- (d)Retribusi terminal
- (e)Retribusi tempat khusus parkir
- (f) Retribusi tempat penginapan
- (g)Retribusi rumah potong hewan
- (h)Retbusi pelayanan kepelabuhanan
- (i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (j) Retribusi penyeberangan di air
- (k)Retribusi penjualan produksi usaha daerah

### 3) Retrubusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berdasarkan pasal 140 ayat 1 UU PDRD adalah pelayanan perizinan tetentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengatuaran dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- (a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (c) Retribusi izin gangguan
- (d) Retribusi izin trayek
- (e) Retribusi izin usaha perikanan

### **c) Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah**

Ida (2012: 85-86) menyebutkan karakteristik pemungutan retribusi daerah antara lain :

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

### **d) Ciri-ciri Retribusi Daerah**

Ida (2012 :114) menyebutkan ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda)
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi

Atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atau pembayaran yang dilakukannya

- 4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan retribusi daerah adalah secara ekonomi ,yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## **2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **a) Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor**

Ahmad (2009: 73) mendefinisikan pengujian kendaraan bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan & kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

### **b) Objek dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

PERDA Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan/ atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor .Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

### **c) Pemungutan Retribusi**

PERDA Nomor 16 Tahun 2011 pasal 13 menyebutkan tatacara pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan
- 2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan standar ketentuan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 4) Petugas atau pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan perizinan penyelenggaraan transportasi , ditunjuk oleh walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah.
- 6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota.

**d) Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Tarif**

PERDA Nomor 16 Tahun 2011 pasal 10 menyebutkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif yaitu sebagai berikut:Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**e) Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Tarif retribusi tahun 2016 berdasarkan Peraturan daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 pasal 9, menyatakan bahwa besarnya tarif pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB)

(a) Mobil Bus Umum dan Mobil Tak umum	Rp.42.000/ per6 bulan
(b) Mobil Penumpang Umum	Rp.41.000/per6 bulan
(c) Mobil Barang Umum Dan Tak umum	Rp 42.000/per6 bulan
(d) Mobil khusus	Rp.42.000/ per6 bulan
(e) Kereta gandeng dan Kereta tempelan	Rp.41.000/ per6 bulan

2) Biaya Administrasi

(a) Permohonan	Rp. 2.500
(b) Buku Uji	Rp. 10.000
(c) 1(satu) pasang plat uji	Rp. 5.000

**f) Tata Cara Pembayaran**

PERDA Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam pasal 16,17 dan 18 menyatakan bahwa terdapat tata cara pembayaran antara lain:

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas Umum daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi

harus disetor ke Kas Umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh walikota.

- 3) Tatacara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.
- 4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai
- 5) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- 6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- 7) Bentuk isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh walikota.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Ahmad (2009: 51) mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatn yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b) Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Mahmudi (2010 : 16) menyatakan sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Bagian laba pengelolaan asset daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

### **c) Pemetaan Potensi Pendapatan**

Mahmudi (2010: 50) menyatakan bahwa pemetaan potensi pendapatan masing-masing daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosial, budaya, geomorfologi, ekologi dan sebagainya. faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan global dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional dan daerah. PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setia tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu pemerintah daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut menjadi tolak ukur dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

### **d) Potensi Keuntungan dan Kerugian Kemitraan Pemerintah Daerah**

Mahmudi (2010: 186-187) menyebutkan ada beberapa jenis pelayanan publik yang akan lebih menguntungkan jika dikerjasamakan melalui model kemitraan sedangkan sebagian yang lain lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. untuk itu, sebelum memutuskan pelayanan mana yang akan dikerjasamakan melalui model kemitraan maka perlu dilakukan kemitraan mendalam terkait kebutuhan pelayanan, cakupan pelayanan, aktivitas pelayanan, dan aspek pembiayaan atau anggaran.

Potensi keuntungan yang akan didapat pemerintah dalam kemitraan atau kerjasama antara lain:

- 1) Penghematan biaya
- 2) Mengurangi resiko
- 3) Memperbaiki pelayanan dan kualitas pelayanan
- 4) Meningkatkan efisiensi anggaran
- 5) Meningkatkan pendapatan
- 6) Mendorong pertumbuhan sektor swasta
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Disamping memberikan keuntungan yang potensial, kemitraan pemerintah daerah juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian yaitu:

- (a) Kehilangan kontrol oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan. Setelah dikerjasamakan, maka sebagian atau seluruh kendalinya harus dialihkan kepada mitra kerja.
- (b) Meningkatnya biaya yang disebabkan karena estimasi harga atau biaya yang tidak akurat.
- (c) Meningkatkan risiko politik
- (d) Kualitas pelayanan yang turun jika ternyata mitra yang dipercaya tidak kompeten atau bangkrut.
- (e) Memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses pemilihan pemenang tender.

#### e) Rencana Penerimaan Target Retribusi

Indra (2010: 70) mendefinisikan target adalah seperangkat sasaran dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertentu dimasa yang akan datang, seperti target *Output* dan target kinerja (efisiensi, kualitas pelayanan dan kinerja keuangan). Ahmad (2006: 18-19) mengungkapkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan pemungutan potensi retribusi daerah yang ada sebagai penerimaan daerah digunakan tiga pendekatan:

- 1) Dari segi Subjek, akan memberikan gambaran mengenai persentase dari sejumlah subjek yang dapat dijaring oleh unit/persentase yang menanggung pemungutan, baik subjek yang sudah terdaftar maupun subjek yang belum terdaftar.
- 2) Dari segi pemungutan, pada dasarnya sama dengan *Administration Eficiency Ratio* (AER) menurut subjek, hanya bedanya disini akan dapat menggambarkan ratio dari objek retribusi pemungutan yang telah terdaftar dan objek retribusi yang belum terdaftar.
- 3) Dari segi penerimaan, diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, semakin besar AER berarti semakin besar memungut, yang berarti pula aktifitas pemungutan dapat tercapai.

#### f) Penetapan target penerimaan retribusi

Penetapan target merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Penetapan target mempunyai sasaran pokok yaitu:

- 1) Memperjelas rencana setrategi
- 2) Membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian
- 3) Melimpahkan tanggung jawab kepada pimpinan untuk memberi otorisasi jumlah yang di izinkan untuk dikeluarkan dalam mengonfirmasikan kinerja yang di harapkan.
- 4) Memperoleh kesepakatan bahwa penetapan target merupakan dasar penilaian kinerja.

Berikut adalah tahap-tahap dalam penentuan target penerimaan:

- (a) Menentukan tujuan yang akan dicapai
- (b) Mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu
- (c) Melihat proses perkembangan yang akan datang
- (d) Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Prosedur penetapan target harus berpedoman pada data yang rill dan data realistis tahun lalu, perkiraan pertimbangan kenaikan atau perumpamaan dalam tahun yang lalu dan hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain perkembangan jumlah objek pungutan.

### **g) Penetapan target yang mempengaruhi penerimaan retribusi**

Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pemungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang No.12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah yang menunjukkan beberapa faktor kelemahan antara lain yaitu:

- 1) Hasilnya kurang memadai jika dibanding dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- 2) Biaya pemungutan yang relatif tinggi.
- 3) Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, dan setruktur.
- 4) Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayaran retribusi.
- 5) Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar penampilan atau objek yang sama.

### **h) Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah**

Hasil penelitian Mei dkk (2013:5-6) menyatakan strategi optimalisasi penerimaan retribusi adalah :

- 1) Memperluas basis penerimaan.

Strategi yang terkait dengan cara mengidentifikasi atau melakukan pendataan terhadap retribusi.

2) Memperkuat proses pemungutan.

Strategi optimalisasi penerimaan retribusi dengan cara mengadakan rapat evaluasi pendapatan, peningkatan SDM melalui sosialisasi pedagang dan bimbingan teknik bagi juru pungut serta pembuatan leaflet mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan retribusi.

3) Meningkatkan pengawasan.

Strategi untuk lebih menertibkan membayar retribusi tepat waktu.

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Untuk lebih menertibkan administrasi terkait retribusi sehingga meminimalisir kesalahan administrasi dan kesalahan penyetoran.

**i) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Mahmudi (2010: 143) menyebutkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan daerah dapat diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Sangat Efektif > 100 %

d) Kurang Efektif 75%-89%

b) Efektif 100%

e) Tidak efektif < 75%

c) Cukup Efektif 90%-99%

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sugiyono (2009: 53-55) menyatakan jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui optimalisasi yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan sistem penerimaan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang, dengan mengumpulkan data berupa data target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telpon (0711) 441175 Faksimile (0711) 442527 Kode Post 30146 E-mail : dishub [palembang@yahoo.co.id](mailto:palembang@yahoo.co.id), website : [www.dishub.palembang.go.id](http://www.dishub.palembang.go.id)

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesikasikan bagaimana variabel ini diukur. Operasional variabel dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mei dkk yaitu sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Optimalisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	Cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperluas basis penerimaan.</li> <li>b. Memperkuat proses pemungutan.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan.</li> <li>d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.</li> </ul>

Sumber : *Peneliti, 2016.*

#### **D. Data yang Diperlukan**

Nur & Bambang (2009:146-147) menyebutkan data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa laporan target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang tahun 2011-2015 dan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2011-2015.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sugiyono (2009: 402-425) menyebutkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

## 2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

## 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara yaitu komunikasi langsung yang dilakukan peneliti kepada kepala bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang di perlukan yang berupa data target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2011-2015 dan jumlah kendaraan bermotor tahun 2011-2015

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis data**

Sugiyono (2009: 13-14) menyebutkan Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu menjelaskan uraian mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Metode kuantitatif yang menganalisis besarnya potensi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan mengumpulkan data-data yang berupa target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, data besarnya tarif retribusi dan cara penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu dengan cara:

- a) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berupa PERDA, target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan tahun 2011-2015, daftar jumlah kendaraan di wilayah Kota Palembang tahun 2011-2015.
- b) Menghitung Rasio efektifitas Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

- c) Mengidentifikasi permasalahan yang ada
- d) Menjelaskan upaya peningkatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instasional, melainkan tahapan-tahapan Instasional yakni berawal dari terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Palembang I berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II Kodya Palembang. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk kelancaran administrasi, setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas I LLAJ Tingkat Kodya Palembang oleh WalikotaPalembang berubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaanya dibawah Pemerintah Daerah Kodya Tingkat II Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Otonomi Daerah, berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota

Palembang, dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota Palembang.

## **2. Struktur Organisasi**

### **a. Kedudukan dan fungsi pokok**

Dinas Perhubungan adalah salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Kota Palembang, dirumuskan dua misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemberi izinan dibidang perhubungan

Dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas, pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tetap stabil, pengawasan terhadap pemakai/pengguna jalan dalam upaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas sesuai dengan arah, koridor dan trayek yang ditetapkan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas sarana prasarana aparatur

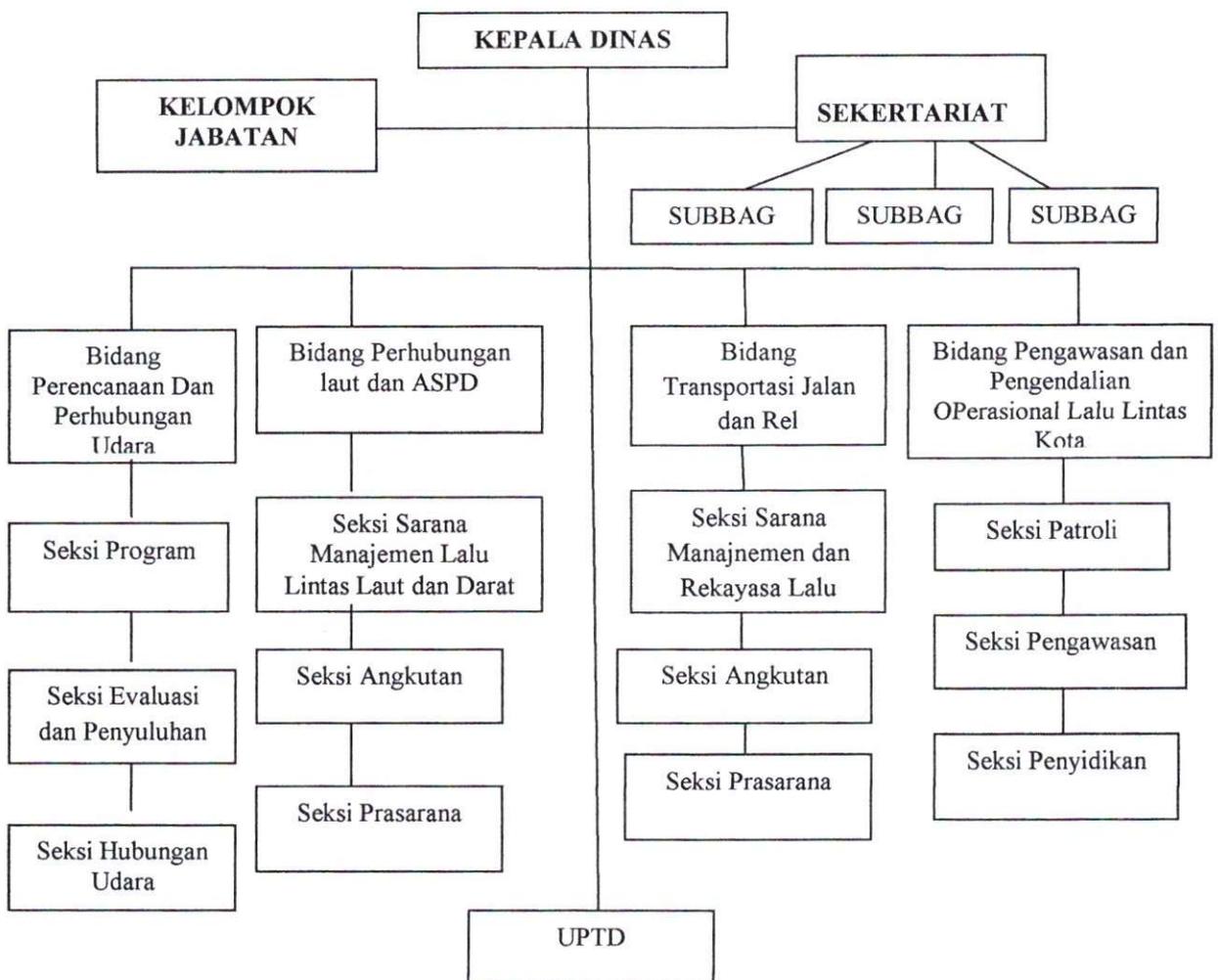
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai sehingga dapat memberikan kinerja pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Selain itu kualitas sumber daya aparatur yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam

penyelenggaraan tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsi masing-masing

**c. Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat dilihat pada bagan lembar berikut ini :

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang**



Sumber: Dinas Pehubungan Kota Palembang, 2016

### 1) Kepala Dinas

#### a. Tugas

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentraliasasi di bidang perhubungan.

#### b. Fungsi

- 1) Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- 4) Mengelola urusan ketatausahaan dinar.
- 5) Membina unit pelaksana Teknis Dinas.
- 6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang perhubungan.

### 2) Sekretaris Dinas

#### a. Tugas

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum.

#### b. Fungsi

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

### 3) Subbag Umum

Bertugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

4) Subbag Kepegawaian

Bertugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

5) Subbag Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

6) Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel

a. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, teknis secara transportasi jalan dan rel.

b. Fungsi

1) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas.

2) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana transportasi jalan dan rel.

3) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ.

4) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang transportasi jalan dan rel.

7) Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendiri bengkel umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

8) Seksi Angkutan Jalan

Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

9) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana jalan dan rel.

10) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

a. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan Taut serta lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

11) Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

12) Seksi Angkutan Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan sungai, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan.

13) Seksi Prasarana Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

14) Kepala Bidang Perencanaan dan Udara

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

## 2) Fungsi

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengola retribusi dibidang perhubungan.

## 15) Seksi Program

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan. Dalam melakukan penyusunan rencana dan program ini tidak lepas dari pengumpulan dan pengelolaan data.

**Tabel IV. 1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**yang dipungut oleh Dinas Perhubungan**  
**kota Palembang tahun 2011 – 2015**

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	Rp.4.200.000.000	Rp.3.235.370.020	77,03%
2012	Rp.4.200.000.000	Rp.3.541.365.380	84,32%
2013	Rp.3.766.000.000	Rp.3.621.986.700	96,18%
2014	Rp.3.954.300.000	Rp.3.570.078.240	90,28%
2015	Rp.3.954.300.000	Rp.3.519.021.580	89,00%

Sumber : *DISHUB Kota Palembang, 2016*

## 16) Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, serta pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

#### 17) Seksi Angkutan Udara

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar udara dan pemberian izin lokasi Bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

#### 18) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

##### 1) Tugas

Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penerbitan pada sektor perhubungan

##### 2) Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

- b) Penyusunan rencana pembinaan, keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- c) Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan dan penegakan hukum dibidang perhubungan.

19) Seksi Patroli dan Pengawalan Kota

Bertugas melaksanakan patrol dan pengawalan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).

20) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota

Bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

21) Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota

Bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan.

22) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu/beberapa wilayah kecamatan dalam suatu daerah. Fungsinya adalah melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya, melaksanakan urusan administrasi.

## **2. Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :**

### **1. Kepala UPTD**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Perhubungan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan barang yang melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
- b) Pengaturan tugas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor
- c) Penerimaan laporan unit-unit penimbangan kendaraan bermotor
- d) Pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas
- e) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

### **3. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan pengaturan personil yang bertugas di jembatan timbang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan, urusan ketatausahaan di jembatan timbang
- b) Penyusunan rencana program penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi
- c) Pelaksanaan pengaturan, penjadwalan bagi personil yang bagus di jembatan timbang.

### 3. Seksi Bina Fasilitas

Seksi Bina Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan dan menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan dan fasilitas jembatan timbang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Bina Fasilitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan kebersihan dan keutuhan fasilitas jembatan timbang
- b) Pembuatan laporan keadaan fasilitas jembatan timbang kepada Kepala Dinas Perhubungan
- c) Pengusulan pemerliharan fasilitas jembatan timbang.

### 4. Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpula, pengolahan dan penyajian data hasil penimbangan, termasuk data arus barang dalam bentuk laporan berkala. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data
- b) Penyajian data yang diperlukan
- c) Penyampaian dan pengasripan data

### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD penimbangan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### **3.Kepegawaiaan**

#### **a. Pegawai Negeri Sipil**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 208 orang.

#### **b. Tenaga Honor Oprasional**

Jumlah tenaga honorarium oprasional pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 82 orang terdiri dari 71 orang pria dan 11 wanita. Tenaga honor oprasional diangkat berdasarkan keputusan Walikota Palembang.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.**

Dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang maka yang akan dianalisis dalam bab ini adalah mengenai optimalisasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang. Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu dimulai dari:

### 1. Perluasan basis penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan perbaikan administrasi, upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara mengevaluasi tarif retribusi Pengujian kendaraan bermotor.

Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk katagori mobil bus umum dan mobil tak umum adalah Rp.42.000/ per 6 bulan sedangkan untuk biaya administrasi adalah Rp.17.500/ per 6 bulan jadi biaya yang harus di tanggung wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Rp.59.500/ per 6 bulan. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil penumpang umum adalah Rp.41.000/ per 6 bulan sedangkan biaya administrasi adalah Rp.17.500/ per 6 bulan jadi biaya yang harus ditanggung wajib retribusi adalah Rp.58.500/per6 bulan. Tarif untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil barang umum dan tak umum adalah Rp.42.000/per6 bulan biaya administrasi adalah Rp.17.500/per6 bulan total biaya yang harus di tanggung wajib retribusi adalah sebesar Rp.59.500/per6 bulan. Tarif untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil khusus adalah Rp.42.000/per6 bulan biaya administrasi adalah Rp.17.500/per6 bulan total biaya yang harus ditanggung wajib retribusi adalaah Rp.59.500/per6 bulan. Tarif untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor kereta gandeng dan kereta tempelan adalah Rp.41.000/per6 bulan dan biaya administrasi

adalah Rp.17.500/per6 bulan total biaya yang ditanggung wajib retribusi adalah Rp.58.500/per6 bulan. Tarif yang dipungut tersebut sesuai PERDA Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terdapat pada pasal 9.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa pemilik angkutan umum biaya yang telah ditetapkan pemerintah tersebut masih tergolong terjangkau, karena mau tidak mau uji ker harus diurus supaya bisa ambil atau menarik angkutan penumpang, tetapi walaupun tarif yang telah ditentukan pemerintah terbilang terjangkau tetap saja masih ada wajib retribusi yang tidak mengurus uji ker angkutan yang mereka operasikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan diatas mengenai tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang di kenakan pemerintah sesuai dengan PERDA Nomor 16 sudah terbilang efisien karena masyarakat menilai tarif tersebut terjangkau. Hanya saja penentuan target yang di lakukan pemerintah yang belum realistis sehingga target yang ditentukan masih belum tercapai sesuai keinginan pemerintah.

Tingkat realistis dan efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD peneliti akan mengukur dengan menggunakan rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan (dianggarkan). Rasio efektivitas

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu perusahaan atau sektor publik dapat diukur dengan cara realisasi penerimaan pendapatan dibagi dengan target penerimaan dikalikan 100%.

Berikut adalah kriteria tingkat efektifitas:

- a) Jika diperoleh nilai > 100% berarti sangat efektif
- b) Jika diperoleh nilai 100% berarti efektif
- c) Jika diperoleh nilai 90%-99% berarti cukup efektif
- d) Jika diperoleh nilai 75%-89% berarti kurang efektif
- e) Jika diperoleh nilai < 75% berarti tidak efektif

Tingkat efektifitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam pencapaian target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2011-2015 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

(1) Tahun 2011

Tingkat efektifitas

$$\frac{3.235.370.020}{4.200.000.000} \times 100\% = 77,03\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2011 yaitu sebesar 77,03%, berarti pengukuran kinerjanya adalah kurang efektif.

## (2) Tahun 2012

Tingkat efektifitas

$$\frac{3.541.365.380}{4.200.000.000} \times 100\% = 84,32\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2012 yaitu sebesar 84,32%, berarti pengukuran kinerjanya adalah kurang efektif.

## (3) Tahun 2013

Tingkat efektifitas

$$\frac{3.621.986.700}{3.766.000.000} \times 100\% = 96,18\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2013 yaitu sebesar 96,18%, berarti pengukuran kinerjanya adalah cukup efektif.

## (4) Tahun 2014

Tingkat efektifitas

$$\frac{3.570.078.240}{3.954.300.000} \times 100\% = 90,28\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2014 yaitu sebesar 90,28%, berarti pengukuran kinerjanya adalah cukup efektif.

## (5) Tahun 2015

Tingkat efektifitas

$$\frac{3.519.021.580}{3.954.300.000} \times 100\% = 89,00\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2015 yaitu sebesar 89,00%, berarti pengukuran kinerjanya adalah kurang efektif.

Setelah diukur dengan menggunakan rasio Efektifitas PAD, maka dapat dilihat bahwa target yang di tetapkan pemerintah kurang efektif, karena hasil pencapaian kurang dari 100% Oleh karena itu, pemerintah dalam menentukan target harus lebih memperhatikan rasio efektifitas, demi tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang yaitu:

1) Penentuan Target belum realistis

Sistem penentuan target pendapatan yang dilakukan Dinas perhubungan, dalam pengelolaan PAD di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan data target tahun sebelumnya. Hal mengakibatkan terlalu besarnya target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang dicapai.

2) Masih adanya mobil yang berdomisili di Kota Palembang tetapi melakukan uji di luar Kota Palembang.

3) Kurangnya kesadaran oleh wajib uji untuk mengujikan kendaraannya

4) Terbatasnya kewenangan dishub untuk melakukan penertiban kendaraan yang tidak laik jalan raya.

Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran membayar bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor. Solusi

yang baik menurut peneliti, Dinas Perhubungan Kota Palembang harus memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang melanggar. Seperti yang diketahui bahwa tujuan uji ker adalah Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak memiliki kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan lingkungan. Jika pemberlakuan sanksi yang tegas telah ditetapkan pemerintah maka ini akan memungkinkan tercapainya pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang. Adapun alasan masyarakat tidak mau menguji ker yaitu:

- 1) Mobilnya rusak dan tidak dioperasikan lagi.
- 2) Izin trayek yang tidak diperpanjang lagi.
- 3) Kondisi ekonomi yang berubah-ubah.
- 4) Faktor cuaca juga pengahalang bagi wajib uji untuk menguji ker.
- 5) Masalah waktu, menurut mereka waktu terbuang sia-sia karena harus mengantri lama jika saat tanggal massa ujinya habis bersamaan dengan kendaraan lainnya.

## **2. Memperkuat proses pemungutan**

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu peningkatan SDM. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam peningkatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, sumber daya manusia disini yaitu aparat pemungutan retribusi hendaknya

memiliki kemampuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka emban yaitu dalam pemungutan retribusi, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki aparat akan dapat melaksanakan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain. wajib retribusi lebih meningkatkan kesadaran mereka dalam hal melaksanakan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, agar wajib retribusi dapat lebih meningkatkan kesadaran mereka dalam melaksanakan pembayaran retribusi, hendaknya dinas perhubungan lebih meningkatkan penyuluhan kepada wajib retribusi bahwa retribusi yang mereka bayar digunakan untuk membiayai dan penyelenggaraan pemerintah daerah, selain itu retribusi yang dipungut juga untuk memperbaiki sarana dan prasaranan yang ada di tempat pengujian kendaraan bermotor.

### **3. Meningkatkan pengawasan**

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan, Dengan pengawasan yang baik maka keberhasilan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor bisa diminimalisir.

Demikian halnya dengan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang menghindari

menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangam serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadi. Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang. Pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi pada kenyataanya petugas Dinas Perhubungan kurang efektif dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kebocoran penerimaan retribusi contoh kebocoran yang terjadi tersebut adalah kelolosan terhadap mobil angkutan yang tidak menguji ker, dan itu merupakan suatu kendala yang menyebabkan belum tercapainya target retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengakibatkan masih banyaknya mobil angkutan yang tidak menguji ker. Petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, yaitu dengan cara mengontrol setiap mobil angkutan yang akan beroperasi mengangkut penumpang ataupun barang melakukan razia pada mobil-mobil atau kendaraan yang sedang beroperasi itu dengan cara meminta agar para sopir atau pemilik angkutan umum menunjukkan bukti bayaran mereka atas perolehan jasa umum pengujian kendaraan bermotor.

a) Penilaian kembali terhadap pelayanan

Pelayanan menyangkut kemudahan terhadap uji ker yang diberikan kepada masyarakat dan kesederhanaan alur pelayanan sampai dengan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Persyaratan administrasi dalam uji ker sebagaimana telah diatur pemerintah harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Numpang Uji Masuk

- a) Surat Pengantar dari Kantor PKB daerah
- b) BPKB asli beserta fotocopy
- c) STNK asli beserta fotocopy
- d) KTP Pemilik Kendaraan asli beserta fotocopy (apabila dikuasakan disertai Surat Kuasa dari Pemilik Kendaraan)

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem Mekanisme pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran
- 2) Pemilik Kendaraan / Pemohon mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi dengan membawa persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan Pengujian Kendaraan Periodik 6 (enam) Bulan Sekali.
- 3) Mengisi Formulir Permohonan
- 4) Melunasi biaya uji

- 5) Kendaraan dibawa ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a) Penentuan besaran Retribusi berdasarkan Jenis Kendaraan
- b) Membeli Buku Uji (Kendaraan Baru/Buku Uji Habis) dan Tanda Lulus Uji Plat Uji
- c) Perhitungan Jumlah dan Penetapan Retribusi
- d) Membayar Biaya Retribusi dan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran

### 3) Pemeriksaan Kendaraan

Pemeriksaan meliputi :

- a) Pra Uji
- b) Uji Mekanik

### 4) Verifikasi

Verifikasi data dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Bermotor

#### 1) Pengesahan

Petugas Administrasi di Bagian Plat Uji dan Buku Uji melakukan Entry Nomor Seri Plat Uji dan Buku Uji (untuk ganti buku uji), kemudian dilakukan pengesahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk oleh petugas

yang berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, selanjutnya buku uji diserahkan kepada pemohon dan petugas di bagian dokumentasi, ijin usaha dan kartu induk menjadi satu tempat dan disimpan pada arsip.

#### Pelaksanaan Pra Uji Kendaraan Bermotor

Meliputi kegiatan :

Pra Uji, yaitu Pemeriksaan Awal Kendaraan Uji yang meliputi;

- 1) Melakukan Pencocokan Data Kendaraan
- 2) Kontruksi Kendaraan Bermotor berupa pengamatan secara visual
- 3) Rangka Landasan berupa pemeriksaan kondisi
- 4) Motor Penggerak berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- 5) Sistem Pembuangan berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- 6) Penerus Daya
- 7) Sistem Roda
- 8) Sistem Suspensi
- 9) Alat Kemudi
- 10) Sistem Rem
- 11) Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya

- 12) Komponen Pendukung berupa pemeriksaan unjuk kerja
- 13) Badan Kendaraan, terdiri dari pemeriksaan, pengukuran dan pengamatan secara visual
- 14) Peralatan dan perlengkapan kendaraan, terdiri dari pemeriksaan dan pengamatan secara visual
- 15) Perisai Kolong,
- 16) Ukuran Kendaraan berupa pengukuran dimensi kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan

Prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat pada bagian halaman lembar berikutnya:

Proses penerbitan pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah sederhana, tetapi masyarakat masih saja beranggapan bahwa prosedurnya untuk melakukan uji ker masih rumit. Menurut peneliti bukan prosedur pemberian uji ker yang rumit, karena prosedur pelayanan uji ker sudah sangat sederhana tetapi kesalahan masyarakat yang belum melengkapi persyaratan yang telah ditentukan yang membuat rumitnya pemberian uji ker.

Pelayanan dalam rangka uji ker ini sangat mudah karena jika persyaratan telah di penuhi untuk mengurus pengujian kendaraan ini hanya memerlukan waktu paling lama 30 menit sampai satu jam.

Menurut peneliti Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus pengujian kendaraan bermotor sudah baik dan prosedur yang sudah dilakukan cukup mudah dan sederhana, serta pelayanannya terbilang efektif karena pelayanan dalam segi waktu yang diberikan petugas untuk melakukan uji ker sangat cepat hanya memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam saja. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus pengujian kendaraan yang masih terbilang rendah. Solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi beralasan rumitnya prosedur yaitu mensosialisasikan prosedur yang ada dengan cara memanfaatkan fasilitas media misalnya melalui koran, radio dan televisi, agar masyarakat yang menganggap pemberian pelayanan uji ker rumit tersebut memiliki kesadaran dan mau melakukan uji ker angkutan atau kendaraan yang dimiliki.

b) Memperbaiki sistem penerimaan daerah

Sistem penerimaan daerah yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam sistem penerimaan daerah pemerintah daerah sudah memiliki sistem penerimaan yang sederhana.

c) Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat membayar retribusi serta memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Tujuan diberikannya penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar retribusi adalah agar masyarakat termotivasi untuk membayar

retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar. Dalam hal pemberian penghargaan ini Pemerintah Kota Palembang belum menerapkan atau belum melakukannya. Solusi yang baik menurut peneliti yaitu sebaiknya Pemerintah Kota Palembang harus menerapkan pemberian penghargaan yang memadai, jika hal tersebut diterapkan maka akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Serta belum efektifnya pemberlakuan sanksi penerimaan retribusi daerah yang pada kegiatannya masih dituntut untuk dilakukan penegasan hukum atas kelalaian atau penghindaran pembayaran yang dilakukan wajib retribusi.

Pemberian sanksi yang mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu diperhatikan, sebab ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat masyarakat dalam kepatuhannya, maka diperlukanya tingkat ketegasan hukum yang diwujudkan dengan pemberlakuan sanksi yang tegas oleh petugas. apabila pemberlakuan sanksi tersebut berjalan dengan baik, maka masyarakat akan termotivasi untuk taat melakukan pemenuhan kewajiban dalam membayar retribusi izin trayek.

Upaya lain yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah pemerintah Dinas Perhubungan dan DPRD sebaiknya melakukan pengecekan mendadak terhadap para petugas yang melakukan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan, apakah petugas melaksanakan tugasnya

dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, serta melainkan pengecekan mendadak terhadap para sopir angkot dan bus kota yang belum melakukan uji ker retribusi pengujian kendaraan bermotor, selain menentukan target DPRD juga seharusnya berperan penting dalam pengawasan atas kebocoran pendapatan tersebut. jika dalam pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah masih ada yang belum melakukan uji ker maka sebaiknya pemerintah Dinas Perhubungan harus memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut peneliti, Dinas Perhubungan juga harus menjalankan tiga cara dalam melakukan pengawasan terhadap kebocoran yang terjadi, tiga cara tersebut adalah:

- 1) Melakukan pengendalian langsung atau observasi untuk melihat sendiri bagaimana petugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya pengamatan langsung maka berbagai manfaat dapat di ambil seperti memperoleh informasi yang akurat dan dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan secara langsung.
- 2) Menerima laporan baik lisan maupun tulisan dari ketua lapangan yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan yang dilakukan petugaspengujian kendaraan bermotor, yang tujuannya apabila ada kendala dalam proses melakukan uji ker ada solusi yang didapatkan.
- 3) Sebaiknya Dinas Perhubungan membagikan Kuisisioner kepada wajib retribusi tentang anggapan pelayanan yang telah diberikan Pemerintah

dan Fasilitas yang disediakan kepada para objek retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang tujuan untuk menampung semua informasi baik keuntungan maupun keluhan yang dialami masyarakat atau objek retribusi dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **4.Peningkatan Efisiensi Administrasi dan menekan biaya pemungutan**

Administrasi pendapatan adalah salah satu aspek dari administrasi keuangan yang sering kali diabaikan suatu organisasi, walaupun melibatkan unit atau dinas lain tapi dilaksanakan tanpa adanya prosedur tetap.

Sering tidak disadari bahwa sebenarnya perbaikan atas prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Administrasi pendapatan mencakup semua kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, sesuai peraturan dan kebijakan daerah. Administrasi pendapatan dimulai pada saat pemerintah daerah membebaskan biaya atas pelayanan yang sesuai dengan fungsinya.

Efisiensi administrasi retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah, karena efisiensi merupakan salah satu dimensi yang perlu dideteksi dalam pengukuran efektifitas pelayanan publik. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan yaitu dengan cara memperbaiki prosedur administrasi, mengurangi biaya pemungutan pendapatan.

Menurut peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan kenyataan yang ada dilapangan saat ini pemerintah daerah sudah memperbaiki prosedur

administrasi, karena perosedur administrasi dalam pembuatan dan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah dilakukan dengan sangat sederhana dan waktu yang singkat, namun dengan demikian walupun prosedur yang dilakukan pemerintah sudah sangat sederhana kenyataan yang terjadi masih saja ada masyarakat yang tidak mau membayar.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan administrasi pendapatan menurut peneliti adalah dengan cara menambah pos pelayanan uji ker di suatu wilayah tertentu tanpa harus datang dinas perhubungan uptd pengujian kendaraan bermotor, ini akan dapat meningkatkan kesadaran wajib uji dan mempermudah wajib uji datang ke pelayanan uji ker yang tidak terlalu jauh, ini akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dan menekan pemungutan karena akan di anggap dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajibanya membayar retribusi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah dengan cara memluas basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif penerimaan. Pemerintah Kota Palembang dalam menentukan tarif penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menguji ker sudah baik, prosedur yang sudah dilakukanpun cukup mudah dan sederhana, serta pelayananya terbilang efektif. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk menguji ker yang masih terbilang rendah.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah juga adalah memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan penghargaan yang memadai kepada wajib retribusi yang taat membayar, yang belum dilakukan pemerintah dalam upaya ini adalah belum dilakukanya pemberian penghargaan terhadap wajib retribusi yang taat membayar. Upaya yang masih harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan dan menekan biaya pemungutan adalah menambah pos pelayanan pengujian kendaraan bermotor, agar lebih memudahkan wajib uji dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor dan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor

sebagai pengguna jasa, tanpa harus datang langsung ke UPTD Dinas Perhubungan, ini akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dalam menetapkan target harus lebih memperhatikan rasio efektifitas, agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai sesuai rencana.
2. Hendaknya Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang melanggar.
3. Seharusnya Pemerintah melakukan razia terhadap mobil-mobil angkutan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor.
4. Pemerintah sebaiknya menambah pos pelayanan pengujian kendaraan bermotor, agar lebih memudahkan wajib uji untuk melakukan uji ker.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2009.*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*.Edisirevisi.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Ida zuraida. 2012.*Teknik Penyusun Peaturan Daerah*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra Bastian.2010.*Akutansi Sektor Publik*.Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi.2010.*Menejemen keuangan daerah*.Jakarta: Erlangga.
- Mei dan Ngadiman. 2013.*Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kota Seleman)*,jupe UNS Vol. 2, No. 1 Hal: 1-10, Diakses 10 Oktober 2015.
- Nur Indriantoro Dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2. *Retribusi pengujian kendaraan bermotor*.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. *Tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor*.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 10. *Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi*.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 13. *Tata Cara Pemungutan Retribusi*.
- Sri. 2013.*Optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang*.Skripsi tidak diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

(B)  
(B)  
(B)  
(B)

http://www.fkip.unsopala.ac.id

12016

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2016  
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
Nama : Nopiyah Sari  
NIM : 22 2012 203  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

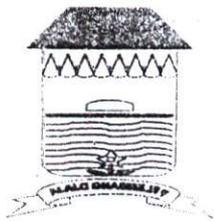
NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Ida zuraidah Hj, S.E., Ak., M.Si	Pembimbing	27/9-2016	
2	Dr.Hj. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	26/9/2016.	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA	Penguji I	16/9-2016	
4	Ida zuraidah Hj, S.E., Ak., M.Si	Penguji II	9/9-2016	

Palembang, September 2016



Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : ( 0711 ) 441175 Faksimile : ( 0711 ) 442547 Kode Pos 30146  
E-mail : [dishub\\_palembang@yahoo.co.id](mailto:dishub_palembang@yahoo.co.id), Website : [www.dishub.palembang.go.id](http://www.dishub.palembang.go.id)

Palembang, 5 April 2016

Nomor : 070 / 805 /DISHUB/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
di -  
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 280/H-5/FEB-UMP/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Mohon Izin permintaan data, dengan ini dilaporkan bahwa:

**NAMA** : NOPIYAH SARI  
**NIM** : 22 2012 203

diizinkan melaksanakan pengambilan data atau penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, dengan ketentuan segala sesuatu selama melaksanakan penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALEMBANG**  
DINAS  
PERHUBUNGAN  
**DRS.H.K.SULAIMAN AMIN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700320 1991011 001

Tembusan :

- 1.Walikota Palembang (Sebagai Laporan)
- 2.Kepala UPTD/Terminal/Dermaga Dishub Kota Plg
- 3.Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.com



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Nopiyah Sari  
Place/Date of Birth : Palembang, November 21st 1993  
Test Times Taken : +2  
Test Date : July, 22nd 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 48  
Structure Grammar : 39  
Reading Comprehension : 36  
OVERALL SCORE : 410

Palembang, July, 25th 2016

Chairperson of Language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd., M.A

Universitas Muhammadiyah Palembang  
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 511/TEA FE/LB/UMP/VII/2016

123 Certificates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PIJASAM**

No. 086/H-4/LPKKN/UMP/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : NOPIYAH SARI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012203  
Fakultas : EKONOMI  
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 21-11-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Plaju Ulu (B)  
Kecamatan : Plaju  
Kota/Kabupaten : Palembang  
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui  
Rektor  
  
Dr. Abid Dzazuli, S.E., M.M.

  
Palembang, 14 Maret 2016  
Ketua LPKKN,  
Alhanannasir, M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*



# Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DIBERIKAN KEPADA :**

**NAMA : NOPIYAH SARI**  
**NIM : 222012203**  
**PROGRAM STUDI : Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (25)** Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Sabtu, 18 Juni, 2016  
an. Dekan

Wakil Dekan IV



**Dr. Purmahsyah Ariadi, M.Hum**  
**NBM/NIDN : 731454/0215126902**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Nopiyah Sari	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 203	KETUA : Ida Zuraidah, Hj., SE., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi Sektor Publik	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5 Juni 2016	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
2	15 Juni 2016	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
3	25 Juni 2016	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		ACC
4					lanjut BAB IV
5	11 Juli 2016	BAB IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
6	17 Juli 2016	BAB IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
7	19 Juli 2016	BAB IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
8	21 Juli 2016	BAB IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
9	22 Juli 2016	BAB IV	<i>[Signature]</i>		ACC, lanjut
10					BAB V
11	24 Juli 2016	BAB V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
12	25 Juli 2016	BAB V	<i>[Signature]</i>		ACC
13					
14					
15					
16					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :



*[Signature]*  
Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA

## BIODATA PENELITI

Nama : Nopiyah Sari  
Nim : 22 2012 203  
JenisKelamin : Perempuan  
Tempat/TglLahir : Palembang, 21 November 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
AlamatLengkap : Jl.Baung Raya Blok A2 KomplekPusriSako PLG  
Nama Ayah : RomliMuin  
NamaIbu : Farina  
NomorTelpon/Hp : 082176833775  
E-mail : [Nopiyahsari@yahoo.co.id](mailto:Nopiyahsari@yahoo.co.id)

### RiwayatPendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 144 Palembang	2006
2	SMP Negeri 27 Palembang	2009
3	SMA BinaCipta Palembang	2012